



## Harapkan Opini WTP

**BUPATI** Kayong Utara Hildi Hamid mengharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal wajar tanpa pengecualian (WTP). Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, minimal 'CC' dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik.

*Roadmap* reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 (Permen PAN-BR 37/2013), tentang Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, ada tiga target sasaran. Seperti, terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara telah menyusun *assessment roadmap* reformasi birokrasi Kayong Utara tahun 2013, serta dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 276/OR/VI/2014 tahun 2014.

"Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku tim dan beserta seluruh kelompok kerja, supaya dapat memberikan perhatian khusus pada penyusunan, terutama dalam pengumpulan dan pengolahan data," pesan Bupati, kemarin.

Bupati sangat menginginkan sekali Kabupaten Kayong Utara, walaupun *non-pilot project*, namun memiliki komitmen yang dibuktikan dalam pengelolaan reformasi birokrasi. "Harapan saya, opini BPK minimal WTP, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, minimal 'CC' dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik," doa Hildi. Bupati mengajak untuk mendukung dan menyukseskan proses pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Dimulai dengan terbentuknya reformasi birokrasi ini salah satu langkah dari pemerintah daerah, ucapnya. (mah)